

Covid 19, *Noli Me Tangere* dan Solidaritas Global

Otto Gusti*

Media Indonesia, 29 April 2020

<https://m.mediaindonesia.com/read/detail/308486-covid-19-noli-me-tangere-dan-solidaritas-global>

Egalitarianisme radikal sedang menjadi nyata di hadapan guncangan pandemi Covid-19. Pandemi ini menghantam siapa saja tanpa pandang perbedaan status sosial, ekonomi, ras, agama dan warna kulit. Entah Anda saleh atau kafir juga belum menjadi jaminan untuk aman dari serangan virus mematikan ini. Bahkan inflasi kesalehan dengan mengabaikan panduan akal sehat dalam menghadapi pandemi corona tak mustahil berujung pada tragedi kematian.

Pandemi virus ganas ini telah menginfeksi sekitar 2,9 juta penduduk dunia, sementara angka kematian sudah melampaui 200 ribu orang. Untuk menghentikan penyebaran virus ini, bukan isolasi diri tapi kerja sama antarnegara pada tingkat global dipandang sangat urgen (Bdk. Yuval Noah Harari, 2020).

Noli Me Tangere

Seruan untuk membangun kerja sama pada tingkat global dirasakan sebagai sebuah paradoks. Alasannya, model kunci dalam menghentikan penyebaran virus corona justru merupakan antagonisme dari sosialisasi yakni *self-isolation* dan *social distancing*. Sebab, kedekatan dalam model apa saja dapat berarti maut.

Paradoks ini dirumuskan oleh filsuf neomarxis asal Slovenia, Slavoj Zizek, dengan ungkapan *noli me tangere*. *Noli me tangere* adalah ungkapan bahasa latin yang berarti “jangan menyentuh saya”. Peringatan ini disampaikan Yesus kepada Maria Magdalena yang hendak menjamahNya karena terkejut bercampur gembira melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu Paskah.

Zizek berpandangan bahwa pernyataan Yesus ini membingungkan atau paradoksal. Bagaimana mungkin Yesus yang semasa hidupnya selalu berbicara tentang kasih, bela rasa dan solidaritas, melarang orang yang sangat mengasihiNya datang mendekat dan menyentuhNya.

Slavoj Zizek yang mengaku sebagai seorang Kristen ateis menjelaskan paradoks tersebut sebagai berikut. Yesus yang bangkit dari antara orang mati tidak lagi hadir sebagai pribadi atau *persona* yang dapat disentuh. Ia hadir secara simbolis di antara umat manusia yang menghayati kasih dan solidaritas. “Do not touch me, touch and deal with other people in the spirit of love” – “Jangan menyentuh saya, tapi jamahlah dan hiduplah dengan orang-orang dalam semangat kasih” (Zizek, 2020, hlm. 1).

Jadi di tengah pandemi Covid 19, tidak penting menyentuh secara fisik orang yang kita kasihi. Sebaliknya belas kasih dan bela rasa harus kita tunjukkan dengan menciptakan jarak fisik. Jarak

fisik bukan berarti jarak sosial. Sebab pandemi ini hanya dapat dihadapi dengan antibodi sosial yakni keadilan, kasih dan solidaritas.

Jika selama ini egalitarianisme sering menjadi jargon kosong, pandemi Covid 19 memberikan awasan serius bahwa manusia sungguh-sungguh setara di hadapan kerentanan sebagai korban. Egalitarianisme kerentanan sekurang-kurangnya harus menjadi titik tolak kerja sama global.

Peta politik global menampilkan satu contoh menarik beberapa waktu lalu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di luar dugaan menawarkan bantuan dan kerja sama kepada pemerintah Palestina. Tawaran bantuan ini tentu saja bukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan atau kedermawanan, tapi semata-mata pertimbangan pragmatis bahwa rakyat Israel dan Palestina sama-sama rentan terinfeksi virus corona (Zizek, 2020, hlm. 14). Karena kedekatan geografis kedua negara ini, maka jika satu kelompok terinfeksi, kelompok lain juga akan terancam. Persoalan ini hanya dapat diselesaikan dengan menjalin kerja sama.

Solidaritas Global

Akan tetapi kerja sama global tentu saja harus melampaui pertimbangan strategis-pragmatis semata dan berubah menjadi solidaritas global. Pandemi Covid 19 adalah momen untuk memperteguh solidaritas global tersebut. Pemimpin sejawad Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus, mengingatkan kita bahwa dunia sekarang sedang berada dalam kondisi dilanda “*globalization of indifference*” (globalisasi ketidakpedulian) yang berdampak pada ketidakmampuan untuk menangis dan mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Di tengah dunia yang diwarnai dengan apatisme dan ketidakpedulian, kita perlu mempromosikan budaya tandingan yakni sikap bela rasa (*compassion*) dan belas kasih (*mercy*).

Pandemi Covid-19 menyadarkan dan membuka kembali kesamaan antara umat manusia yakni kerentanan universal (*common vulnerability*). Sebagai manusia kita terbentuk dari materi yang sama dan rentan. Karena itu kita semua adalah saudara dan saudari terlepas dari perbedaan agama, ras, budaya, status sosial dan bangsa.

Kemanusiaan yang rentan itu menjadi basis persaudaraan dan solidaritas antar umat manusia. Persaudaraan tersebut mendesak kita untuk bersikap peduli terhadap yang lain terutama yang menderita lewat imajinasi, kreativitas, dedikasi dan sikap dermawan. Sikap peduli dan solidaritas berawal dengan mengakui dan menerima kerentanan kita bersama.

Politik Ekonomi Pasca Covid- 19

Solidaritas global dan sikap etis di atas hanya dapat bertahan jika diterjemahkan ke dalam sebuah sistem politik. Tak dapat dipungkiri bahwa model pembangunan ekonomi global yang diterapkan 30 tahun terakhir merupakan salah satu faktor penyebab munculnya pandemi virus corona. 174 ilmuwan Belanda beberapa waktu lalu mengeluarkan sebuah manifesto tentang model politik ekonomi pasca Covid-19. Manifesto ini dapat dijadikan panduan bagi pembangunan ekonomi global di masa depan termasuk di Indonesia.

Model pembangunan neoliberal yang memberikan penekanan pada pertumbuhan telah bermuara pada kerusakan dan bencana ekologis yang membuka peluang bagi munculnya sejumlah virus

mematikan seperti Covid 19. Untuk itu transformasi agrikultural harus menciptakan model pertanian regeneratif yang berpijak pada keselamatan biodiversitas serta promosi pangan lokal dan vegetarian yang berkelanjutan.

Perhatian juga hendaknya diberikan pada pembangunan sejumlah sektor publik yang krusial seperti clean energy, kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Sementara model pembangunan yang tidak sustainable dan hanya mendorong konsumsi harus dikurangi. Hal ini terutama berkaitan dengan sektor privat minyak, gas, pertambangan dan bisnis iklan.

Paradigma ekonomi masa depan juga harus lebih banyak memberikan perhatian pada redistribusi yang adil. Untuk itu perlu ditetapkan upah minimum universal (*universal basic income*) yang bertolak dari sistem kebijakan sosial universal, penerapan sistem pajak progresif untuk penghasilan, laba bisnis dan kekayaan dan pengakuan akan nilai intrinsik kerja-kerja sosial, pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

*Dosen Filsafat Politik dan HAM di STFK Ledalero, Maumere, Flores, NTT;
alumnus program doktoral di Hochschule für Philosophie, München, Jerman.